



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM KIP KULIAH SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI LAMPUNG

Salma Tabina¹⁾, Irma Yunita²⁾, Perina Dwi Astuti³⁾, M. Sulton Robani⁴⁾, Abdul Halim⁵⁾

- ¹⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: salmatabina175@gmail.com
- ²⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: irmayunita100919@gmail.com
- ³⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: perinadwidwi@gmail.com
- ⁴⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: intersulton@gmail.com
- ⁵⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: abdulhalim@fkip.unila.ac.id

Abstract

The Indonesia Smart Card (KIP) for College Program is a government policy designed to help students from low-income families access higher education. This program provides tuition and living expenses assistance to alleviate economic barriers. Studies have shown that the KIP for College has had a positive impact on increasing educational access, reducing economic burdens, and improving student motivation and academic achievement. However, its implementation still faces challenges such as inaccurate recipient targeting, delayed disbursement of funds, and lack of oversight. Overall, the KIP for College is considered effective in supporting the continuity of student studies. Therefore, improved data verification, transparency, and oversight are needed to optimize the program's operation.

Keywords: KIP for College, higher education, educational assistance, program effectiveness.

Abstrak

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup guna mengurangi hambatan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa KIP Kuliah berdampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan, pengurangan beban ekonomi, serta peningkatan motivasi dan prestasi belajar mahasiswa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya pengawasan. Secara umum, KIP Kuliah dinilai efektif dalam mendukung keberlangsungan studi mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan verifikasi data, transparansi, dan pengawasan agar program berjalan lebih optimal.

Kata kunci: KIP Kuliah, pendidikan tinggi, bantuan pendidikan, efektivitas program.



PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional. Melalui pendidikan tinggi, masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan zaman. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak lulusan sekolah menengah tidak dapat melanjutkan pendidikan meskipun memiliki kemampuan akademik yang baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menghadirkan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai bentuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sehingga mahasiswa dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh kendala ekonomi. Kehadiran KIP Kuliah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Program KIP Kuliah telah memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa penerima bantuan. Program ini membantu meringankan beban ekonomi, meningkatkan motivasi belajar, serta mendukung keberlangsungan studi mahasiswa hingga menyelesaikan pendidikan tinggi. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam memperluas kesempatan masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program KIP Kuliah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan pencairan dana, kurangnya sosialisasi program, serta pengawasan yang belum optimal. Berbagai kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan mengenai implementasi, dampak, kendala, efektivitas, serta rekomendasi kebijakan Program KIP Kuliah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas implementasi Program KIP Kuliah sebagai kebijakan publik dalam mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan mengenai implementasi, dampak, kendala, dan efektivitas Program KIP Kuliah. Sementara itu, wawancara dilakukan kepada beberapa mahasiswa penerima KIP Kuliah untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam menerima dan memanfaatkan bantuan tersebut.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Program KIP Kuliah. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi manfaat, kendala, tingkat efektivitas, serta rekomendasi perbaikan kebijakan Program KIP Kuliah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi seluruh warga negara (Sucita, 2021).

KIP Kuliah memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Program tersebut merupakan pengembangan dari program Bidikmisi yang sebelumnya telah dilaksanakan pemerintah. Perubahan kebijakan pendidikan menyebabkan Bidikmisi bertransformasi menjadi KIP Kuliah dan kemudian berkembang menjadi KIP Kuliah Merdeka sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan tinggi di Indonesia (Azzahrawani et al., 2024).

Dari penelitian yang kami lakukan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik dengan menggabungkan studi literatur dan hasil wawancara mendalam. Hasil menunjukkan bahwa KIP Kuliah memberikan manfaat yang signifikan dalam meringankan beban biaya UKT dan mendukung kelancaran perkuliahan, meskipun terdapat variasi manfaat antar skema bantuan. Program ini juga meningkatkan motivasi belajar mahasiswa penerima. Namun, masih ditemukan permasalahan ketepatan sasaran akibat penyalahgunaan data. Rekomendasi diarahkan pada penguatan verifikasi data dan penyesuaian besaran bantuan sesuai kebutuhan riil mahasiswa.

Pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Meskipun demikian, ketimpangan akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan utama, khususnya bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) hadir sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai kelanjutan dari program Bidikmisi, KIP Kuliah menyediakan bantuan berupa pembebasan biaya UKT, biaya hidup, serta dukungan lainnya bagi mahasiswa berprestasi yang terkendala secara ekonomi.

Hasil wawancara dengan beberapa penerima KIP Kuliah menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam mendukung kelancaran



proses perkuliahan. Menurut Jascika dan Khusnul, bantuan KIP Kuliah sangat membantu dari sisi ekonomi, khususnya dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang secara langsung meringankan pengeluaran orang tua. Jascika menyatakan bahwa bantuan untuk biaya UKT sudah cukup memadai, meskipun untuk kebutuhan buku, transportasi, dan keperluan lainnya kadang masih kurang. Ia menambahkan bahwa setiap semester kampus mewajibkan pembelian buku, sehingga dana bantuan sering dialokasikan untuk keperluan cetak (print) dan perlengkapan kuliah lainnya. Sementara itu, Khusnul mengungkapkan bahwa besaran bantuan yang diterima sudah sangat memadai untuk membeli laptop sebagai keperluan utama kuliah serta biaya transportasi.

Berbeda dengan keduanya, Bina yang menerima KIP Kuliah skema 2 (hanya pembebasan UKT tanpa bantuan biaya hidup) menyatakan bahwa program ini lumayan mendukung, tetapi terasa agak berat karena tidak adanya bantuan untuk kebutuhan kuliah lainnya. Menurutnya, beberapa peralatan kuliah memiliki harga yang cukup mahal, sehingga tanpa dukungan biaya hidup dari pemerintah, ia harus lebih selektif dalam pengeluaran. Sadi pun memiliki pandangan serupa, bahwa skema 2 hanya memberikan bantuan yang sedikit meskipun tetap bermanfaat.

Selain dampak ekonomi, keberadaan KIP Kuliah juga berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Para penerima merasa lebih termotivasi untuk menjaga indeks prestasi kumulatif (IPK) di atas 3,00 serta berusaha lulus tepat waktu, karena adanya ketentuan dan dorongan dari pihak perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan prestasi akademik.

Dari sisi implementasi, proses seleksi KIP Kuliah dinilai sudah cukup tepat sasaran. Namun, para informan mengakui masih terdapat penyalahgunaan oleh sebagian pihak. Beberapa orang yang secara ekonomi mampu justru membuat data seolah-olah tidak mampu, termasuk dengan memalsukan dokumen. Kondisi ini menyebabkan program tidak sepenuhnya tepat sasaran dan berpotensi merugikan calon penerima yang benar-benar membutuhkan.

Apabila program KIP Kuliah tidak ada, sebagian besar informan menyatakan tetap akan melanjutkan kuliah. Namun, mereka harus bekerja sambil kuliah, yang pada akhirnya akan memberatkan kondisi ekonomi keluarga. Temuan ini memperkuat bahwa KIP Kuliah berperan penting sebagai instrumen pemerataan kesempatan pendidikan tinggi.

Dalam pembahasan, hasil wawancara ini selaras dengan berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan dampak positif program beasiswa terhadap akses dan keberlangsungan studi mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Meski demikian, variasi skema bantuan (skema 1 dan skema 2) menyebabkan perbedaan tingkat manfaat yang dirasakan mahasiswa. Temuan mengenai penyalahgunaan data juga menjadi catatan penting bahwa penguatan mekanisme verifikasi lintas lembaga (DTKS, Dukcapil, dan perguruan tinggi) menjadi kebutuhan mendesak.

Kebijakan KIP Kuliah telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa penerima, baik dari aspek ekonomi maupun motivasi belajar. Program ini berhasil meringankan beban UKT orang tua, mendukung kebutuhan perkuliahan, serta mendorong prestasi akademik. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa ketidaktepatan sasaran akibat penyalahgunaan dan ketidaksesuaian besaran bantuan pada skema tertentu.

Untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang, disarankan agar pemerintah melakukan penguatan sistem verifikasi data yang lebih ketat, penyesuaian besaran bantuan sesuai kebutuhan riil mahasiswa, serta peningkatan sosialisasi dan monitoring. Dengan demikian, KIP Kuliah dapat semakin optimal dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas di Indonesia.

A. Dampak Program KIP Kuliah terhadap Mahasiswa

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan. Melalui bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, mahasiswa dapat menjalani perkuliahan dengan lebih baik tanpa harus terbebani oleh keterbatasan ekonomi yang dimiliki keluarganya (Yusra, 2024).

1. Dampak Positif Program KIP Kuliah terhadap Mahasiswa

a) Meningkatkan Akses dan Kesempatan Mengenyam Pendidikan Tinggi

Salah satu dampak positif yang paling dirasakan mahasiswa adalah terbukanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebelum adanya program KIP Kuliah, banyak lulusan SMA yang memiliki kemampuan akademik baik namun tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Kondisi ekonomi keluarga sering kali menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang mengurungkan niat untuk kuliah. Melalui program KIP Kuliah, hambatan tersebut dapat diminimalkan sehingga mahasiswa tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak (Hakikih, 2024).

Program ini juga memberikan kesempatan yang sama kepada mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk daerah terpencil dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, KIP Kuliah berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan yang sebelumnya hanya mudah diakses oleh kelompok ekonomi tertentu kini dapat dinikmati oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

b) Meringankan Beban Ekonomi Mahasiswa dan Keluarga

KIP Kuliah memberikan manfaat yang sangat besar dalam membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan selama



menjalani perkuliahan. Dana bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan akademik maupun kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pembelian buku, biaya transportasi, akses internet, biaya tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan proses pendidikan (Sari, 2025).

Bantuan tersebut juga memberikan dampak positif bagi keluarga mahasiswa. Orang tua tidak lagi menanggung seluruh biaya pendidikan sehingga beban ekonomi keluarga menjadi lebih ringan. Kondisi ini sangat membantu terutama bagi keluarga yang memiliki penghasilan rendah atau memiliki lebih dari satu anak yang sedang menempuh pendidikan. Dengan adanya bantuan tersebut, mahasiswa dapat lebih fokus menjalani perkuliahan tanpa harus terlalu memikirkan masalah keuangan.

c) Meningkatkan Prestasi Akademik Mahasiswa

Keadaan ekonomi yang lebih stabil memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih fokus pada kegiatan akademik. Mahasiswa tidak perlu bekerja secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan kuliah sehingga waktu dan tenaga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk belajar. Situasi ini berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi belajar, kedisiplinan dalam mengikuti perkuliahan, serta kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik dengan baik (Saputra, 2025).

Selain itu, mahasiswa penerima KIP Kuliah cenderung memiliki kesadaran yang tinggi untuk mempertahankan prestasi akademik. Mereka memahami bahwa bantuan yang diterima merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Oleh karena itu, banyak mahasiswa berusaha mempertahankan nilai yang baik, meningkatkan kemampuan akademik, serta aktif mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.

d) Meningkatkan Motivasi Belajar dan Semangat Berprestasi

KIP Kuliah tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk berusaha lebih keras dalam mencapai cita-cita. Mahasiswa penerima bantuan umumnya memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan studi tepat waktu dan memperoleh hasil yang memuaskan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bantuan yang telah diberikan (Amelia, 2023).

Motivasi tersebut juga tercermin dalam keterlibatan mahasiswa pada berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik. Banyak penerima KIP Kuliah yang aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan, seminar, pelatihan, lomba, serta berbagai kegiatan pengembangan diri lainnya. Aktivitas tersebut membantu mahasiswa meningkatkan kompetensi yang akan berguna dalam dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

e) Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Harapan Masa Depan

Program KIP Kuliah memberikan dampak psikologis yang positif bagi mahasiswa. Kesempatan untuk berkuliah membuat mahasiswa merasa lebih percaya diri terhadap

kemampuan yang dimiliki. Mereka merasa memiliki peluang yang sama dengan mahasiswa lainnya untuk meraih kesuksesan melalui pendidikan (Wolo, 2025).

Selain itu, program ini juga menumbuhkan harapan yang lebih besar terhadap masa depan. Mahasiswa memandang pendidikan tinggi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Dengan memperoleh gelar pendidikan tinggi, mereka berharap dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat.

2. Dampak Negatif Program KIP Kuliah terhadap Mahasiswa

a) Timbulnya Tekanan untuk Mempertahankan Prestasi Akademik

Di samping berbagai manfaat yang diperoleh, mahasiswa penerima KIP Kuliah juga menghadapi tekanan untuk mempertahankan prestasi akademik. Mereka merasa harus menjaga nilai dan performa akademik agar tetap memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Tekanan tersebut terkadang menimbulkan rasa cemas dan kekhawatiran ketika hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan (Wolo, 2025).

Bagi sebagian mahasiswa, tekanan tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis dan menimbulkan stres selama menjalani perkuliahan. Meskipun demikian, tekanan tersebut sering kali juga menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasinya.

b) Potensi Penyalahgunaan Dana Bantuan

Dampak negatif lainnya adalah kemungkinan penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Beberapa mahasiswa menggunakan sebagian dana yang diterima untuk kebutuhan konsumtif yang tidak berkaitan dengan proses perkuliahan. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas program dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa (Sastrawardana, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari mahasiswa untuk mengelola dana bantuan secara bijaksana dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan. Pengelolaan dana yang baik akan membantu mahasiswa memperoleh manfaat yang lebih besar dari program KIP Kuliah.

c) Munculnya Stigma Sosial

Sebagian mahasiswa penerima KIP Kuliah terkadang mengalami stigma sosial karena dianggap berasal dari keluarga kurang mampu. Meskipun tidak terjadi pada semua mahasiswa, kondisi tersebut dapat memengaruhi rasa percaya diri dan kenyamanan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan kampus (Wolo, 2025).

Namun demikian, banyak mahasiswa yang mampu menjadikan kondisi tersebut sebagai motivasi untuk menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi dan keberhasilan dalam pendidikan.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Program

Meskipun Program KIP Kuliah telah memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi efektivitas program. Berbagai permasalahan tersebut



muncul mulai dari proses seleksi penerima bantuan, pencairan dana, hingga pemanfaatan bantuan oleh mahasiswa. Apabila kendala-kendala tersebut tidak ditangani dengan baik, tujuan program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi dapat terhambat (Sari, 2025).

1. Ketidaktepatan Sasaran Penerima Bantuan

Salah satu kendala yang sering menjadi perhatian dalam pelaksanaan KIP Kuliah adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Dalam praktiknya, masih ditemukan mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi cukup baik namun memperoleh bantuan, sementara terdapat mahasiswa yang lebih membutuhkan justru tidak menerima KIP Kuliah. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian data ekonomi calon penerima atau kurang optimalnya proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak terkait (Yusra, 2024).

Ketidaktepatan sasaran dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan mahasiswa dan mengurangi efektivitas program. Oleh karena itu, proses pendataan dan verifikasi perlu dilakukan secara lebih teliti agar bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria.

2. Keterlambatan Pencairan Dana

Kendala lain yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa adalah keterlambatan pencairan dana bantuan. Dana biaya hidup yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang diterima tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Akibatnya, mahasiswa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya makan, transportasi, dan kebutuhan akademik lainnya (Sari, 2025).

Bagi mahasiswa yang sangat bergantung pada bantuan tersebut, keterlambatan pencairan dana dapat mengganggu aktivitas perkuliahan dan menimbulkan tekanan ekonomi. Oleh sebab itu, ketepatan waktu dalam penyaluran dana menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.

3. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Program

Pelaksanaan KIP Kuliah juga masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai mekanisme dan aturan program. Sebagian mahasiswa belum memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan. Kurangnya informasi tersebut sering menyebabkan kesalahan dalam pengurusan administrasi maupun pelaporan yang diperlukan selama masa penerimaan bantuan (Yusra, 2024).

Sosialisasi yang lebih intensif diperlukan agar mahasiswa dapat memahami tujuan program, tata cara penggunaan dana, serta berbagai ketentuan yang harus dipatuhi selama menjadi penerima KIP Kuliah.

4. Penggunaan Dana yang Kurang Tepat

Kendala berikutnya adalah penggunaan dana bantuan yang kurang sesuai dengan tujuan program. Dana yang seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan dan biaya hidup terkadang digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan proses perkuliahan. Hal ini dapat mengurangi manfaat program dan menyebabkan

kebutuhan akademik mahasiswa tidak terpenuhi secara optimal.

Pengelolaan keuangan yang kurang baik dapat berdampak pada keberlangsungan studi mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari penerima bantuan untuk menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

5. Kurangnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Program

Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan Program KIP Kuliah. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap penerima bantuan dan penggunaan dana masih belum sepenuhnya optimal. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima maupun penyalahgunaan dana bantuan (Sari, 2025).

Melalui pengawasan yang lebih baik, pihak perguruan tinggi maupun pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa penerima.

C. Efektivitas Program KIP Kuliah

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) merupakan instrumen kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Keberadaan program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi sekaligus mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam jenjang pendidikan tinggi. KIP Kuliah memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sehingga mahasiswa dapat menjalankan aktivitas akademik secara lebih optimal tanpa dibatasi oleh keterbatasan finansial (Sariri & Prabawati, 2024).

Kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan pendidikan sangat berkaitan dengan kemampuannya dalam mempertahankan keberlangsungan studi peserta didik. Bantuan pendidikan berbasis kebutuhan ekonomi memiliki kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan akses pendidikan dibandingkan bantuan yang hanya berorientasi pada capaian akademik. Temuan (Rahawarin et al. (2025)) memperlihatkan bahwa program bantuan pendidikan mampu menurunkan risiko putus sekolah serta meningkatkan retensi pendidikan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dukungan finansial memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan proses pendidikan.

Efektivitas KIP Kuliah juga tercermin pada peningkatan kesempatan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Ketersediaan bantuan biaya pendidikan memungkinkan mahasiswa mengalokasikan waktu dan energi secara lebih maksimal pada kegiatan akademik. Hambatan ekonomi yang sebelumnya berpotensi mengganggu proses belajar dapat diminimalkan sehingga mahasiswa memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan keberlangsungan studi hingga tahap kelulusan. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian



Rahawarin et al. (2025) yang menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan retensi dan keberhasilan studi penerima manfaat.

Capaian akademik menjadi salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan KIP Kuliah. Penelitian Hamidah et al. (2025) menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara efektivitas program KIP Kuliah dan prestasi akademik mahasiswa. Bantuan yang diterima mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk meningkatkan fokus belajar, mengikuti kegiatan akademik, serta mengembangkan potensi diri selama masa perkuliahan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan program diikuti oleh peningkatan capaian akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Aspek keberhasilan program tidak hanya diukur melalui peningkatan prestasi akademik, tetapi juga melalui tingkat ketercapaian tujuan kebijakan. Sariri dan Prabawati (2024) menjelaskan bahwa efektivitas program KIP Kuliah tercermin dalam kemampuan program menjangkau mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan, memberikan dukungan biaya secara berkelanjutan, serta membantu mahasiswa memperoleh hak pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa program mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai sarana perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Ketepatan sasaran menjadi komponen penting dalam menentukan kualitas implementasi program. Akurasi proses seleksi berpengaruh langsung terhadap tingkat efektivitas kebijakan karena menentukan apakah bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria. Evaluasi pelaksanaan KIP Kuliah di Universitas Negeri Surabaya menunjukkan bahwa verifikasi administrasi dan survei lapangan merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan kesesuaian data calon penerima dengan kondisi riil di lapangan. Mekanisme tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat (Sariri & Prabawati, 2024).

Kualitas tata kelola program juga memiliki hubungan erat dengan efektivitas pelaksanaan KIP Kuliah. Pengelolaan yang didukung oleh sistem administrasi yang baik, transparansi informasi, serta evaluasi yang berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan penyelenggara program melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala implementasi, termasuk keterlambatan penyaluran bantuan maupun permasalahan administratif lainnya. Praktik evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas program (Sariri & Prabawati, 2024).

Lingkungan perguruan tinggi turut menentukan keberhasilan implementasi KIP Kuliah. Penelitian Hayanti dan Meditamar (2025) menunjukkan bahwa mahasiswa

penerima KIP Kuliah yang memperoleh pembinaan akademik, spiritual, dan pengembangan karakter menunjukkan perkembangan kompetensi yang lebih baik. Program pembinaan yang terstruktur memberikan dukungan tambahan bagi mahasiswa dalam menghadapi tuntutan akademik maupun sosial selama menjalani pendidikan tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas KIP Kuliah tidak hanya ditentukan oleh bantuan finansial, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan yang diberikan perguruan tinggi kepada penerima manfaat.

Meskipun menunjukkan berbagai capaian positif, pelaksanaan KIP Kuliah masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterlambatan pencairan dana bantuan, keterbatasan akses informasi, serta kurang optimalnya proses verifikasi penerima merupakan beberapa persoalan yang ditemukan dalam implementasi program. Keberadaan hambatan tersebut dapat memengaruhi kualitas layanan dan manfaat yang diterima mahasiswa. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta penyempurnaan mekanisme seleksi menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada masa mendatang (Hamidah et al., 2025; Sariri & Prabawati, 2024).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, KIP Kuliah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan keberlanjutan studi, mendukung capaian akademik mahasiswa, serta memperkuat pengembangan kompetensi penerima manfaat. Efektivitas program akan semakin optimal apabila didukung oleh ketepatan sasaran, tata kelola yang akuntabel, penyaluran bantuan yang konsisten, dan sistem pembinaan mahasiswa yang berkelanjutan.

D. Rekomendasi Kebijakan untuk Perbaikan Program

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program ini menjadi bentuk komitmen negara dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, KIP Kuliah diharapkan mampu mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu faktor utama penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Menurut Fitriani et al. (2025), implementasi KIP Kuliah telah memberikan kontribusi positif terhadap perluasan akses pendidikan tinggi, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan penyempurnaan kebijakan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah sistem verifikasi dan validasi data calon penerima. Ketepatan sasaran merupakan indikator utama keberhasilan program bantuan pendidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan adanya mahasiswa dengan kondisi ekonomi yang relatif mampu memperoleh



bantuan, sementara mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin justru tidak terakomodasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi yang digunakan belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun sistem verifikasi berbasis integrasi data dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kependudukan dari Dukcapil, data Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta sumber data lain yang relevan. Integrasi tersebut akan menghasilkan proses seleksi yang lebih objektif dan mampu meminimalkan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan (Fitriani et al., 2025).

Selain memanfaatkan integrasi data nasional, proses verifikasi juga perlu diperkuat melalui verifikasi faktual di lapangan. Perguruan tinggi dapat membentuk tim khusus yang bertugas melakukan survei langsung terhadap calon penerima yang memiliki data meragukan atau menunjukkan ketidaksesuaian antara dokumen administratif dengan kondisi nyata. Pelibatan pemerintah daerah, aparat desa, maupun sekolah asal juga dapat menjadi alternatif untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga mahasiswa. Dengan adanya verifikasi berlapis, peluang terjadinya penyalahgunaan program dapat ditekan sehingga bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan. Tidak hanya itu, evaluasi kondisi ekonomi penerima perlu dilakukan secara berkala setiap tahun akademik agar pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi keluarga penerima (Bahtiar & Nugroho, 2025).

Di samping penguatan verifikasi, mekanisme seleksi KIP Kuliah juga perlu dikembangkan melalui pendekatan multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada tingkat pendapatan keluarga. Penentuan penerima hendaknya mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, kondisi kesehatan orang tua, status yatim atau piatu, kondisi disabilitas, lokasi tempat tinggal di daerah tertinggal atau terpencil, serta kerentanan sosial lainnya. Pendekatan ini diyakini mampu menghasilkan proses seleksi yang lebih adil dan inklusif karena memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi oleh calon mahasiswa. Liu dan Retnawati (2025) menjelaskan bahwa mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali menghadapi tantangan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan biaya pendidikan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya pendukung selama menempuh pendidikan tinggi.

Permasalahan lain yang memerlukan perhatian adalah mekanisme pencairan dana bantuan yang sering mengalami keterlambatan. Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah, bantuan biaya hidup merupakan sumber pendanaan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya makan, tempat tinggal, transportasi, pembelian buku, hingga akses internet. Keterlambatan pencairan dapat mengganggu proses belajar bahkan memaksa mahasiswa mencari pekerjaan tambahan yang berpotensi menurunkan prestasi akademik. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menetapkan standar operasional prosedur

yang jelas mengenai jadwal pencairan dana dan memastikan koordinasi yang baik antara kementerian, perguruan tinggi, dan bank penyalur. Pengembangan sistem digital yang memungkinkan mahasiswa memantau status pencairan secara real time juga perlu dilakukan agar proses distribusi bantuan menjadi lebih transparan dan mudah diawasi (Fitriani et al., 2025).

Selain memperbaiki sistem penyaluran dana, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program harus menjadi prioritas utama. Seluruh tahapan pelaksanaan KIP Kuliah mulai dari pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, hingga pencairan dana perlu dilaksanakan secara terbuka dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah dapat mengembangkan portal informasi yang memuat persyaratan, prosedur seleksi, jumlah penerima, distribusi bantuan, serta laporan evaluasi program secara berkala. Transparansi tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program. Sari et al. (2025) menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola program bantuan pendidikan yang akuntabel dan bebas dari praktik penyalahgunaan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan, sistem monitoring dan evaluasi juga perlu diarahkan pada pengukuran dampak program, bukan hanya pada aspek administratif. Selama ini evaluasi sering kali berfokus pada jumlah penerima dan besaran anggaran yang telah disalurkan, sementara dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa belum banyak dianalisis. Pemerintah perlu menyusun indikator evaluasi yang mencakup prestasi akademik, angka putus kuliah, lama studi, tingkat kelulusan, serta kondisi sosial ekonomi penerima setelah menyelesaikan pendidikan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahtiar dan Nugroho (2025) menyatakan bahwa evaluasi berbasis outcome akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Program KIP Kuliah dibandingkan evaluasi yang hanya berorientasi pada aspek administratif.

Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat program pendampingan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah. Bantuan finansial saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa penerima yang berasal dari lingkungan dengan keterbatasan akses pendidikan sehingga membutuhkan dukungan akademik dan psikologis selama masa studi. Perguruan tinggi perlu menyediakan program mentoring, bimbingan belajar, pelatihan kepemimpinan, pengembangan soft skills, literasi digital, literasi keuangan, hingga layanan konseling. Pendampingan tersebut akan membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan akademik sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja. Liu dan Retnawati (2025) mengemukakan bahwa dukungan nonfinansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah dalam menyelesaikan pendidikan tinggi.



KIP Kuliah juga perlu diintegrasikan dengan program pengembangan karier agar manfaatnya tidak berhenti pada pembiayaan pendidikan. Pemerintah bersama perguruan tinggi dapat menjalin kerja sama dengan dunia industri, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun lembaga pemerintah untuk menyediakan kesempatan magang, pelatihan profesional, sertifikasi kompetensi, dan rekrutmen kerja bagi mahasiswa penerima. Integrasi ini akan meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja serta memperbesar peluang mereka memperoleh pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan studi. Dengan demikian, tujuan KIP Kuliah sebagai instrumen peningkatan mobilitas sosial dapat tercapai secara lebih optimal.

Di era transformasi digital, modernisasi sistem pengelolaan KIP Kuliah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemerintah perlu mengembangkan platform digital terpadu yang mengintegrasikan proses pendaftaran, verifikasi, seleksi, pencairan dana, monitoring akademik, hingga pengaduan masyarakat dalam satu sistem yang saling terhubung. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dapat membantu mendeteksi anomali data, menganalisis kelayakan penerima secara otomatis, serta mengurangi risiko terjadinya manipulasi informasi. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, digitalisasi juga akan mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas tata kelola program. Dorman et al. (2026) menunjukkan bahwa optimalisasi layanan digital pada sistem KIP Kuliah dapat meningkatkan kepuasan pengguna sekaligus memperkuat efektivitas pelayanan public.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, dan sektor swasta juga perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan keberhasilan program. Pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui penyediaan data sosial ekonomi yang lebih akurat, sementara perguruan tinggi bertanggung jawab dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap mahasiswa penerima. Di sisi lain, dunia usaha dapat memberikan dukungan melalui penyediaan program magang, pelatihan keterampilan, maupun peluang kerja bagi lulusan KIP Kuliah. Sinergi antar pemangku kepentingan tersebut akan menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, Program KIP Kuliah harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, bukan sekadar program bantuan sosial. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang memperoleh bantuan, tetapi juga dari kemampuan program dalam meningkatkan kualitas lulusan, memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka putus kuliah, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, penyempurnaan kebijakan melalui penguatan verifikasi, peningkatan transparansi, percepatan penyaluran dana, pengembangan sistem evaluasi berbasis dampak, penyediaan pendampingan yang komprehensif, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa KIP Kuliah mampu memberikan

manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Program KIP Kuliah merupakan kebijakan pemerintah yang berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Melalui bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, program ini mampu mengurangi hambatan ekonomi sehingga mahasiswa dapat menjalani proses pendidikan dengan lebih baik.

Pelaksanaan KIP Kuliah telah memberikan berbagai dampak positif, seperti meningkatnya kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, meringankan beban ekonomi mahasiswa dan keluarga, meningkatkan motivasi belajar, serta mendukung pencapaian prestasi akademik. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan pencairan dana, kurangnya sosialisasi, penggunaan dana yang kurang tepat, serta belum optimalnya pengawasan. Kendala-kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas program apabila tidak ditangani secara tepat.

Secara keseluruhan, Program KIP Kuliah dapat dikatakan efektif dalam mendukung keberlangsungan studi mahasiswa dan memperluas akses pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program, diperlukan perbaikan kebijakan melalui penguatan sistem verifikasi dan validasi data penerima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, optimalisasi monitoring dan evaluasi, pengembangan layanan digital, serta pemberian pendampingan yang lebih komprehensif kepada mahasiswa penerima bantuan. Dengan langkah tersebut, Program KIP Kuliah diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, F., Jarudin, J., & Husnita, L. (2023). Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 18409-18413.
- HAKIKIH, K., & KEWUEL, H. (2024). KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN MAHASISWA: STUDI KASUS PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS BRAWIJAYA. *KONSTRUKSI SOSIAL: JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL* Учредители: Actual Insight, 4(3), 96-103.
- Sari, C. C. P., Salsabila, N. M. R., Choirunnisa, A., QA, N. H., Fuadi, M. H., & Nugraha, J. T. (2025). Analisis Program Kip-Kuliah Di Perguruan Tinggi: Studi Evaluatif Terhadap Efektivitas Dan Tantangan.



- JMAN Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, 9(1).
- Saputra, W., Suarman, S., & Mujiono, M. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Beasiswa KIP Kuliah terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(8), 9797-9804.
- Wolo, H. B., & Resi, B. B. F. (2025). MAKNA KIP KULIAH DALAM KEHIDUPAN MAHASISWA: STUDI FENOMENOLOGIS PADA MAHASISWA INSTITUT KEGURUAN DAN TEKNOLOGI LARANTUKA. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(1).
- Yusra, F., Sitorus, A., & Nursaidah, H. S. (2024). Analisis Kebijakan Kip-Kuliah: Tinjauan Kualitatif Terhadap Pengalaman Mahasiswa Universitas Malikussaleh Angkatan 2022. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(11), 944-951.
- Azzahrawani, N. R., Alamri, A. R., Adha, N., Nuari, O. L., & Heronimus, V. (2024). Implementation of the Independent College KIP Policy at Tanjungpura University: Implementasi Kebijakan KIP Kuliah Merdeka di Universitas Tanjungpura. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 12(1), 58-68.
- Kurniawijaya, P. A., & Karsana, I. W. W. (2023). Implementasi metode ahp dalam sistem penunjang keputusan penerima kip kuliah. *JUKI: Jurnal Komputer dan Informatika*, 5(1), 22-31.
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 85-104.
- Saprianto, R., Raysharie, P. I., Hukom, A., & Takari, D. (2023). Implementasi KIP Kuliah Pada Mahasiswa/I Universitas Palangkaraya. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 251-266.
- Sucita, R. (2021). Implementasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-Kuliah) Di Universitas Riau. *Journal Publicuho*, 4(4), 1112-1120.
- Hamidah, H., Jumaidi, J., & Dharma, A. S. (2025). Efektivitas Program KIP-K Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 544-553.
- Rahawarin, B., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN DALAM MENGURANGI SISWA PUTUS SEKOLAH: TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(4), 1053-1067.
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 238-251.
- Bahtiar, R., & Nugroho, A. (2025). Evaluasi Pengelolaan Program KIP Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten: Pendekatan Model CIPP.
- Dorman, A., Fadhilah, M. A., Adityawan, R. M., & Rizal. (2026). Evaluasi Kualitas Layanan Website KIP Kuliah Menggunakan Metode E-GovQual dan Importance-Performance Analysis (IPA).
- Fitriani, I., Izati, N., Ramadhani, F., Arnanda, M. S. F., & Erinaldi. (2025). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 34150-34156.
- Liu, Y., & Retnawati, E. (2025). The Dual Role of KIP-Kuliah in Enabling and Constraining Low-Income Students Thriving in Indonesian Higher Education.
- Sari, C. C. P., dkk. (2025). Analisis Program KIP-Kuliah di Perguruan Tinggi: Studi Evaluatif terhadap Efektivitas dan Tantangan.